

Peran Tokoh Agama Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Malang

Siti Kholifah¹, Siti Zurinani²

^{1,2}Universitas Brawijaya

¹ifah_sosio@ub.ac.id, ²zurienanis@ub.ac.id

Abstract

At the moment, religion study is an important issue in the study of epidemiology. WHO also has issued practical recommendations for religious leaders and faith-based communities to take part in handling the Covid-19 pandemic. Referring this recommendation, this research focuses the role of religious leaders in handling the Covid-19 pandemic in Malang City. This study is considered very important, because in Indonesia, the government is still not able to optimize the role of religious leaders in handling the pandemic. As a result, in many violations of health protocols initiated by religious activities. This study uses a qualitative method and an explanatory case study approach, using Putnam and Coleman's social capital theory. This research show that religious leaders who understand this pandemic as a process of social change that will occur in life and are an epidemic of disease, they have sigsinificant role in minimizing the spread of Covid-19 by limiting religious activities, and urging their followers to obey on helath protocols and carry out vaccinations. Religious leaders are using their social capital in dealing with this pandemic. This creates bonding within the internal religious community, and creates bridging with other institutions in the religious community. In addition, there is a link between the network of religious leaders and the government that is useful in handling the pandemic. However, there are also religious leaders who do not believe in the existence of Covid-19, and tend to act controversial activities with policies to handle the pandemic. This condition causes the bonding among the people is unadequate because the people are devided. Moreover, bridging and linking are also unadequated, because religious leaders tend to be closed to the government and community leaders who will provide socialization abot Covid-19.

Keywords: *Epidemology; Religious Leaders; Pandemic; Handling Covid-19*

Abstrak

Kajian agama kini merupakan isu penting pada kajian epidemologi. WHO juga telah mengeluarkan makalah mengenai rekomendasi praktis bagi tokoh agama dan komunitas berbasis agama untuk ikut andil dalam penanganan pandemi Covid-19. Merujuk hal tersebut, penelitian ini merupakan kajian mengenai peran tokoh agama dalam penanganan pandemi Covid-19 di Kota Malang. Kajian tersebut dirasa sangat penting karena di Indonesia, pemerintah masih belum mampu mengoptimalkan peran tokoh agama dalam penanganan pandemi. Hal ini mengakibatkan banyak pelanggaran protokol kesehatan yang diprakarsai oleh kegiatan-kegiatan keagamaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus ekplanatoris, dengan menggunakan teori modal sosial Putnam dan Coleman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh agama yang memahami pandemi ini sebagai sebagai proses perubahan sosial yang akan selalu terjadi dalam kehidupan dan merupakan wabah penyakit, maka tokoh agama mempunyai peran yang signifikan dalam meminimalisasi penyebaran Covid-19 dengan melakukan pembatasan pada kegiatan keagamaan, serta menghimbau umatnya untuk mematuhi protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi. Tokoh agama menggunakan modal sosialnya dalam penanggulangan pandemi ini. Hal ini

memunculkan *bonding* dalam internal komunitas beragama, serta menimbulkan *bridging* dengan institusi lain di komunitas agama. Di samping itu muncul *linking* antara jaringan tokoh agama dengan pemerintah yang berguna dalam penanganan pandemi. Namun demikian, ada juga tokoh agama yang tidak mempercayai adanya Covid-19, dan cenderung melakukan hal kontroversial dengan kebijakan penanganan pandemic. Kondisi ini menyebabkan *bonding* di antara umatnya tidak terjalin dengan baik karena umat terpecah belah. Selain itu *bridging* dan *linking* juga tidak terjalin dengan baik, karena tokoh agama cenderung tertutup pada pemerintah dan tokoh masyarakat yang akan memberikan sosialisasi tentang Covid-19.

Kata Kunci: Epidemiologi; Tokoh Agama; Pandemi; Penanganan Covid-19

Pendahuluan

Keyakinan agama merupakan indikator penting yang harus dipertimbangkan dalam penanganan wabah penyakit. Keyakinan agama dipercaya dapat dijadikan sebagai faktor utama yang mampu membentuk perilaku masyarakat dalam merespon beberapa permasalahan, termasuk penyakit. Pengalaman penanganan epidemi di Ebola Afrika Selatan juga telah memberikan pelajaran bahwa keterlibatan sektor berbasis agama dianggap sebagai titik balik dalam merespon epidemi. Para pemimpin agama dari lintas agama di Sierra Leone menganjurkan praktik seperti mencuci tangan dan penguburan yang aman (Marshall, 2016). Selain itu, seorang sejarawan agama Jenny Trinitapoli dan Philip Jenkins juga telah menemukan bahwa agama modern kebanyakan muncul sebagai respon atas terjadinya wabah yang mematikan dua pertiga populasi dalam kurun waktu antara 800 SM dan 200 SM. Agama-agama ini memiliki perspektif berbeda tentang penyakit, yang pada akhirnya memengaruhi perilaku dalam menanggapi epidemi seperti polio, campak, dan cacar (Pennisi, 2020).

Hasil survey membuktikan bahwa pandemi Covid-19 telah banyak menimbulkan tekanan mental bagi sebagian besar orang Amerika, sehingga membuat banyak orang Amerika -yang bahkan tidak beragama- berdoa (Miller, 2020). Di lain pihak, agama juga barangkali dapat menghambat penanganan wabah, dengan mengarahkan orang menuju pengobatan yang tidak didasarkan pada sains. Seorang biksu Buddha termuka di Myanmar mengumumkan bahwa satu dosis jeruk nipis dan tiga biji palem akan memberikan kekebalan. Kemudian di Iran, beberapa peziarah digambarkan di film sedang menjilati tempat suci Muslim Syiah untuk pencegahan infeksi (Yee, 2020). Selain itu, masalah penentangan terhadap peraturan *social distancing* yang terjadi di hampir seluruh dunia juga sering kali diprakarsai oleh kelompok beragama. Seperti halnya di Korea Selatan, dimana banyak Gereja yang bersikeras mengadakan pertemuan langsung, melarang penggunaan masker kesehatan, berdoa sambil menyentuh orang lain, dan menolak menyerahkan daftar keanggotaannya kepada petugas kesehatan. Kemudian di Hindia Barat, para pendeta terus mengadakan kebaktian secara langsung atas dasar bahwa kegagalan untuk menghadiri ibadah secara langsung adalah bukti dari kurangnya iman. Begitupula di Amerika, gereja-gereja justru mengambil benang narasi Alkitab untuk mengatakan bahwa terdapat motivasi politik di balik adanya virus Covid-19, sehingga tetap mengadakan kegiatan keagamaan tatap muka (Bodenbender, 2020; Newman, 2020; Yee, 2020). Malaysia, terpaksa melakukan isolasi wilayah Ketika 513 orang dinyatakan positif COVID-19 setelah menghadiri pertemuan keagamaan (Ikhwan & Yulianto, 2020).

Hal yang sama juga terjadi di Indonesia. Kementerian Agama telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 15 Tahun 2020 tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman Covid-19, namun pada realitanya masih banyak terjadi pelanggaran protokol kesehatan. Laporan satgas menyebutkan ada beberapa klaster besar yang bersumber dari kegiatan keagamaan. Di Jakarta, terdapat 17 klaster besar Covid-19 yang muncul dari beberapa kegiatan keagamaan, salah satunya ialah acara Maulid Nabi yang diadakan oleh Habib Rizieq. Di Yogyakarta, kasus Covid-19 mengalami kenaikan yang signifikan akibat 3 klaster besar yang bersumber dari acara

keagamaan yang diadakan oleh Jemaah Tabligh Akbar Sleman dan Gereja Protestan Indonesia bagian Barat (GPIB) Yogyakarta. Di Jawa Barat, kegiatan keagamaan yang diadakan Gereja Bethel Indonesia (GBI) telah menyebabkan 226 orang positif yang terbagi dari 4 klaster. Di Jawa Timur, kegiatan keagamaan yang diadakan oleh Pesantren Temboro telah mengakibatkan 193 kasus positif yang menyebar di 6 provinsi. Terakhir di Sulawesi Selatan, acara Ijtima' Ulama telah mengakibatkan 1.258 orang terpapar virus dan menyebar di 20 provinsi.

Dari beberapa studi dan kasus dapat dikatakan bahwa komunitas agama secara langsung berdampak pada penyebaran virus, baik menghambat atau mempercepat penularan wabah. Oleh karena itu, diperlukan studi ilmiah tentang peran tokoh agama dalam pencegahan penularan wabah Covid-19. Karena bagaimanapun tokoh agama mampu memengaruhi kelompok beragama dalam mengambil keputusan moral dalam hal mematuhi protokol kesehatan (Wildman, Bulbulia, Sosis, & Schjoedt, 2020). Sedangkan, model epidemiologi standar dari penyebaran virus belum pernah memperhitungkan faktor manusia seperti ideologi dan nilai agama. Untuk itu, studi ilmiah tentang agama perlu memunculkan isu-isu yang berkaitan dengan agama yang dapat memengaruhi perilaku dalam penyebaran virus (Bavel et al., 2020; Wildman et al., 2020). Hal ini juga telah direkomendasikan oleh WHO yang baru-baru ini merilis pedoman bagi para pemimpin agama dengan alasan bahwa pemimpin agama juga mempunyai tugas untuk memberikan pemahaman dan informasi yang akurat dan sehat secara medis kepada jemaahnya (Bavel et al., 2020; World Health Organization, 2020). Pemahaman di sini adalah bahwa jika para pemuka agama bertindak sebagai figur otoritas yang mampu mendistribusikan informasi yang dapat diandalkan terkait pandemi Covid-19, ada kemungkinan jemaah juga akan menanggapi informasi ini dengan serius.

Berdasarkan urgensi di atas, penelitian ini memiliki dua tujuan utama; *Pertama*, penelitian ini akan berusaha menjawab bagaimana interpretasi tokoh agama dalam melihat wabah pandemic Covid-19 di Indonesia. *Kedua*, penelitian ini akan berusaha mengurai peran tokoh agama dalam menghambat penularan Covid-19 ataupun memperparah penularan Covid-19. Bagaimanapun tokoh agama merupakan agen di tingkat akar rumput yang harus dipertimbangkan sebagai mata rantai penting dalam jaring pengaman bagi orang-orang yang rentan terhadap wabah di Indonesia. Hal ini disebabkan tokoh agama mampu menghasilkan jenis-jenis jaringan, norma, dan hubungan yang membantu individu dan masyarakat mempertimbangkan keputusan (J. S. Coleman, 1988; Putnam, 1993, 1994). Jaringan sosial merupakan faktor kunci yang dapat memperkuat penyebaran perilaku beresiko ataupun bermanfaat selama epidemi, dan efek ini dapat menyebar salah satunya melalui komunikasi tokoh agama. Oleh karena itu, orang yang mampu membentuk jaringan sosial dapat berperan penting dalam memperlambat penularan vektor penyakit. Hal ini disebabkan mereka dapat berperan sebagai aktor intervensi positif seperti mencuci tangan dan menjaga jarak dengan menginformasikan dan menunjukkannya kepada banyak orang (Bavel et al., 2020).

Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa proporsi intervensi penanganan wabah dapat datang bukan dari efek langsung pada orang yang menerima intervensi, tetapi dari efek tidak langsung pada jaringan sosial, dimana mereka membentuk perilaku yang sama (Djalante et al., 2020; Wildman et al., 2020). Dengan demikian, jaringan sosial dapat berpotensi membentuk norma dan keputusan moral yang dapat dijadikan sumber yang dipercaya untuk membagikan pesan perilaku sehat terhadap berbagai khalayak masyarakat. Untuk menganalisis hal tersebut, penelitian ini secara spesifik akan dilakukan di Kota Malang. Adapun pertimbangan memilih lokasi Kota Malang adalah kultur masyarakat yang melihat tokoh agama mempunyai peranan yang penting dalam kondisi *pagebluk* seperti saat ini. Apa yang dikatakan oleh tokoh agama dianggap sebagai sesuatu yang harus dipatuhi. Wali Kota Malang sendiri juga sering menggandeng sejumlah tokoh agama untuk melakukan sosialisasi terkait beberapa kebijakan, termasuk Covid-19 (Agetya & Haikal, 2021; Aje, 2020; Hartik, 2020).

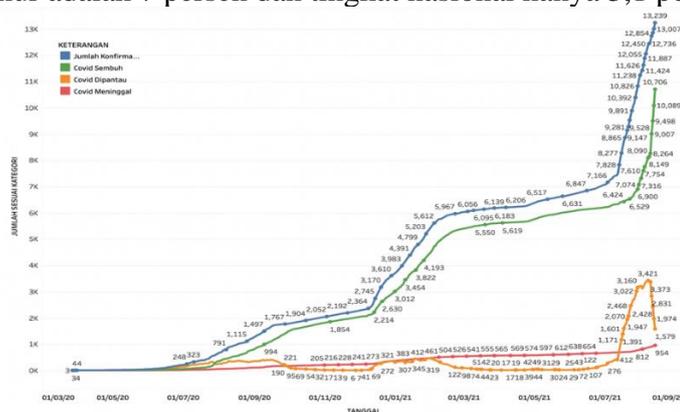
Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus eksplanatori sebagai upaya untuk memahami dan menjelaskan realitas sosial yang diteliti. Secara spesifik, peristiwa yang dialami dalam penelitian ini ialah keberadaan tokoh agama dalam penanganan Covid-19 di Kota Malang. Peristiwa kehadiran tokoh agama dalam penanganan wabah telah dianggap sebagai peristiwa penting. Sebagaimana hal ini membuktikan bahwa penanganan wabah harus juga memperhatikan aspek sosial-budaya masyarakat. Sumber data penelitian berasal dari data primer melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder yang diperoleh melalui buku-buku/referensi, jurnal, pemberitaan di surat kabar, serta data-data dari instansi pemerintah yang berkaitan dengan isu penelitian ini. Informan penelitian ditentukan secara *purposive* dengan kriteria yaitu tokoh-tokoh agama di Kota Malang yang selama ini juga *concern* pada penanganan pandemi Covid-19 di komunitasnya dan/atau di Kota Malang. Hal ini dilakukan untuk mendalami interpretasi tokoh agama dalam melihat fenomena pandemi Covid-19, serta perannya dalam penanganan pandemi. Informan dari tokoh agama antara lain: tokoh agama Budha (Romo Jenjen dan Romo Bambang), tokoh agama Katolik (Bapak YV), dan tokoh agama Islam sekaligus anggota Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Malang (Bapak MA). Selain itu, informan penelitian ini adalah orang – orang yang berada pada komunitas- komunitas keagamaan untuk mengetahui bagaimana peran tokoh agama dalam penanganan pandemi selama ini sebagai proses triangulasi. Informan dari umat beragama yaitu Dewi (umat Katolik), Penjor (umat Hindu), serta Bayu, Hima dan Riris (umat Islam). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui *indepth-interview* pada informan penelitian dengan menggunakan *guide interview*, serta observasi non partisipan pada kegiatan-kegiatan keagamaan dan komunitas umat beragama. Di samping itu juga dilakukan pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian baik dari buku, jurnal, data dari instansi pemerintah dan juga surat kabar. Teknik analisis data dilakukan melalui penjodohan pola sebagai upaya membandingkan pola yang didasarkan atas data empiris dengan pola yang diprediksikan.

Hasil Dan Pembahasan

1. Kota Malang dan Pandemi Covid-19

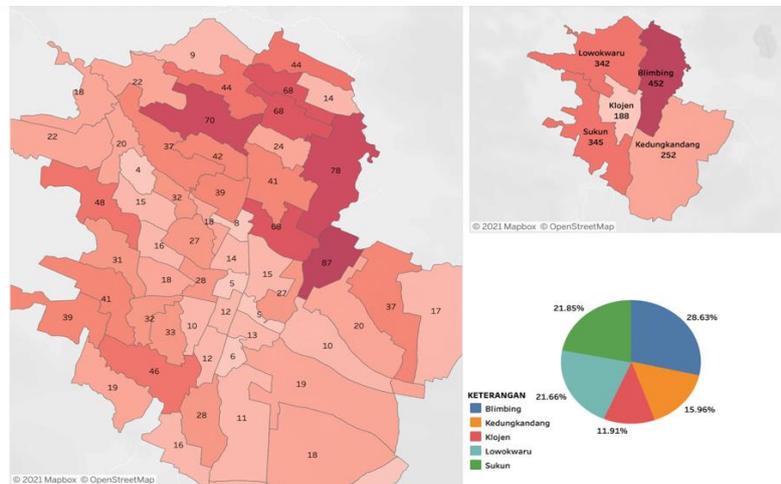
Sejak PPKM darurat yang diberlakukan pada tanggal 3 Juli 2021, Malang Raya termasuk wilayah yang dilakukan perpanjangan pembatasan mobilitas dan aktivitas masyarakat dengan diberlakukan PPKM level 4 sampai 30 Agustus 2021. Hal ini juga sejalan dengan penjelasan ketua IDI Jawa Timur yang menegaskan bahwa angka kematian Covid-19 di Malang Raya sebesar 10 persen dari kasus Covid-19 yang terkonfirmasi merupakan tertinggi di Indonesia (Aminudin, 2021). Sementara lanjut ketua IDI bahwa angka kematian Covid-19 pada tingkat Jawa Timur adalah 7 persen dan tingkat nasional hanya 3,1 persen.



Grafik 1. Perkembangan Kasus Positif Covid-19 Kota Malang Per 14 Agustus 2021

Sumber: <https://covid19.malangkota.go.id/beranda>, 2021

Kondisi tersebut juga bisa dilihat dari trend kenaikan sejak bulan Juli 2021 kasus mulai melonjak tajam lagi pasca libur Hari Raya Idul Fitri dengan penambahan kasus bisa setiap harinya di atas 200 (lihat Grafik 1). Dimana kasus pertama kali orang terkonfirmasi Covid-19 di Kota Malang ditemukan pada tanggal 27 Maret 2020 sebanyak 3 kasus, setelah itu terus mengalami peningkatan. Peningkatan kasus yang signifikan terjadi pada akhir November 2020 sampai awal Februari 2021 dengan penambahan kasus setiap harinya di atas 30. Kasus terkonfirmasi positif semakin naik setelah libur lebaran yang salah satunya juga disebabkan oleh Covid-19 varian delta yang sudah masuk ke Indonesia, dimana penyebarannya lebih cepat dibandingkan varian sebelumnya.



Gambar 1. Peta Sebaran Kasus Konfirmasi Positif Covid-19 Per 14 Agustus 2021
Sumber: <https://covid19.malangkota.go.id/beranda, 2021>

Per 14 Agustus 2021, kasus konfirmasi positif Covid-19 dalam pantauan 1.579, dimana Kecamatan Blimbing menempati posisi tertinggi sebesar 452 orang (28,63 persen) yang tersebar di seluruh kelurahan (lihat Gambar 1). Kemudian disusul secara berurutan Kecamatan Sukun, Lowokwaru, Kedungkandang dan Klojen. Kasus covid dalam pantauan ini juga berimbas secara signifikan pada akumulasi total orang yang terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Malang pada tanggal 14 Agustus 2021 yaitu sejumlah 13.385. Untuk Pemerintah Kota Malang menyediakan dua tempat isolasi terpusat demi menekan laju penyebaran Covid-19, yaitu di BPSDM Jalan Kawi dan RS Lapangan Jalan Simpang Ijen.

Angka penyebaran Covid-19 yang terus mengalami kenaikan sejak 27 Maret 2020 di Kota Malang membuat Pemerintah Kota Malang (Pemkot Malang) memberlakukan kebijakan dalam meminimalisasi penyebaran Covid-19. Kebijakan yang diambil oleh Pemkot Malang dalam menangani pandemic sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Ada beberapa kebijakan selama pandemi ini yang sudah diberlakukan di Kota Malang (lihat tabel 1).

Tabel 1. Kebijakan Pemerintah Kota Malang Dalam Menangani Pandemi Covid-19 Mulai 17 Mei 2020 – 30 Agustus 2021

Tanggal	Kebijakan
17 - 30 Mei 2020	PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) pertama di Malang Raya
11 - 25 Januari 2021	PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) selama dua jilid
23 Februari - 8 Maret 2021	Perpanjangan kebijakan PPKM mikro
3 - 20 Juli 2021	PPKM darurat
21 - 25 Juli 2021	PPKM level 4
26 Juli – 2 Agustus 2021	Perpanjangan PPKM level 4

3 - 9 Agustus 2021	PPKM level 4 dan penguatan posko PPKM mikro tingkat RW/RT
10 – 30 Agustus 2021	PPKM level 4
31 Agustus -	PPKM level 3

Sumber: dari berbagai sumber yang diolah oleh peneliti, 2021

Berbagai kebijakan dalam penanganan Pandemi telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia mulai dari Pusat sampai daerah. Pemerintah Kota Malang berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. HK 01.07/MENKES/305/2020 tentang penetapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di wilayah Malang Raya dan Jawa Timur melakukan kebijakan PSBB mulai 17-30 Mei 2021 dengan pedoman PSBB yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Malang Nomor 17 Tahun 2020 (Febrianto & Astro, 2020). Kebijakan PSBB ini dikeluarkan sebagai strategi meminimalisir penyebaran Covid-19 pada masa libur hari raya Idul Fitri yang jatuh pada tanggal 24-25 Mei 2020.

Selain kebijakan PSBB, Kementerian Agama juga mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Di Rumah Ibadah (kemenag.go.id, 2020). SE ini menekankan pemberlakuan protokol kesehatan di rumah ibadah serta pembatasan Jemaah yang melakukan ibadah secara bersama-sama maksimal 20% dari kapasitas tempat ibadah dan tidak boleh lebih dari 30 orang. SE ini secara tidak langsung juga mengajak tokoh agama untuk berperan serta dalam penanganan pandemi Covid-19 ini.

2. Interpretasi Tokoh Agama di Kota Malang Terkait Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 memunculkan berbagai pertanyaan dan interpretasi baik di kalangan pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama dan juga masyarakat umum. Pandemi yang melanda semua negara di dunia, akhirnya memicu berbagai macam interpretasi bukan hanya dari sisi kesehatan, namun juga konteks sosial, budaya, politik bahkan ke arah konspirasi politik internasional. Hal ini yang kemudian menimbulkan berbagai macam reaksi, antara lain: pertama, mereka yang percaya Covid-19 sebagai virus yang membahayakan; kedua, mereka menganggap virus ini biasa saja seperti virus flu; ketiga, mereka yang tidak percaya virus dan menganggap sebagai konspirasi politik belaka. Beberapa tokoh agama di Kota Malang juga memiliki berbagai macam interpretasi. Bagi tokoh agama Budha memahami pandemi ini lebih pada konteks sosial, dimana pandemi ini merupakan bagian dari perubahan tatanan di dunia. Perubahan dari mobilitas individu yang bebas dan tinggi menjadi terbatas dan harus mematuhi proses.

Hasil wawancara dengan beberapa tokoh agama Budha di Malang (Romo Jejen dan Romo Bambang) menyatakan bahwa pandemi ini merupakan proses perubahan merupakan proses perenungan beliau atas sabda terakhir Sang Buddha sebelum beliau wafat yaitu *Vayadhammā saṅkhārā appamādena sampādetthā'ti* (segala yang berkondisi akan lenyap atau mengalami perubahan, berjuanglah dengan kewaspadaan) (wawancara, 3 Agustus 2021). Sehingga pandemi ini memang bagian dari kehidupan yang selalu mengalami perubahan, dan manusia harus bisa beradaptasi dengan perubahan tersebut. Di samping itu, pemahaman pandemic Covid-19 ini juga terkait pola hubungan manusia dengan lingkungannya. Maka menurut Romo Bambang bahwa pandemi ini merupakan ulah manusia sendiri, bukan kutukan Tuhan. Pola dan gaya hidup masyarakat yang sembrono dan kurang memperhatikan lingkungan menyebabkan munculnya pandemi ini (wawancara, 6 Agustus 2021).

Kedua tokoh agama Budha di Kota Malang ini mempunyai pandangan yang hampir sama, dimana kehidupan manusia itu sangat dinamis, dan perubahan yang ada itu juga dampak dari perilaku manusia itu sendiri. Sehingga setiap individu harus beradaptasi dengan perubahan yang ada melalui perubahan sikap dan perilaku bukan hanya antar manusia, tapi hubungan manusia dengan lingkungannya (baca: alam) juga harus berubah. Sehingga Menurut Romo

Bambang jika terinfeksi Covid-19 maka harus terbuka dan menginformasikan kondisinya agar masyarakatnya di sekitarnya juga bisa membatasi interaksi secara langsung sehingga bisa memutus penyebaran virus ini. Hal ini menunjukkan bahwa pandemi ini bukan hanya terkait masalah kesehatan, tapi juga merubah pola interaksi sosial antara manusia, serta manusia dengan lingkungannya.

Bapak YV (Tokoh agama Katholik, di Malang) juga menekankan bahwa pandemi ini sebagai wabah penyakit, namun dalam mengatasinya diperlukan kepedulian sosial antar masyarakat (wawancara, 11 Agustus 2021). Selain itu, menurut Bapak YV, untuk mengakhiri wabah ini umat juga harus mematuhi kebijakan pemerintah dan disesuaikan dengan nilai-nilai kearifan lokal. Hal yang sama juga dikatakan Hima yang tinggal di pesantren, selama ini kyai dan bu nyai selalu menekankan untuk mematuhi protokol kesehatan serta makan yang banyak (wawancara, 15 Agustus 2021). Bahkan bu nyai juga memberi vitamin pada santrinya agar kondisinya tetap fit selama di pesantren. Hal ini dikarenakan pengasuh pesantren mempunyai pandangan bahwa pandemi ini sebagai sebuah wabah penyakit. Dalam komunitas pesantren meskipun melihat pandemi ini sebagai wabah penyakit, namun pendekatan yang dilakukan bukan hanya medis saja tapi juga melalui pendekatan agama dengan memperbanyak dzikir dan berdoa. Hal ini juga disampaikan oleh tokoh agama Islam, Bapak MA, yang tergabung di FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Kota Malang.

Oleh karena itu dalam penanganan Pandemi Covid-19 ini program dan kebijakan FKUB bersinergi kebijakan-kebijakan pemerintah, serta berperan aktif dalam mengkomunikasikan persoalan-persoalan di akar rumput terkait dengan penanganan pandemi. Selain itu FKUB juga berjejaring dengan Pemerintah Daerah Kota Malang, dinas kesehatan dan tokoh-tokoh masyarakat tegas Bapak MA (wawancara, 2 November 2021).

3. Peran Tokoh Agama dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Peran tokoh agama dalam penanganan pandemi bisa dilihat dari berbagai macam model pelaksanaan peribadatan, kegiatan keagamaan, isi ceramah/khutbah/*dharmawacana* yang disampaikan ke umat atau tindakan-tindakan lain yang dilakukan terkait penanganan pandemi Covid-19. WHO juga merekomendasikan agar semua negara melibatkan tokoh agama dalam penanganan Covid-19. Hal ini dikarenakan tokoh agama bisa aktor yang berpotensi menyampaikan pesan kesehatan, khususnya himbauan untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19 kepada umatnya. Sehingga diharapkan tokoh agama bisa menjadi komunikator kesehatan dalam upaya penanganan pandemi ini. Ada beberapa peran yang dilakukan tokoh agama di Kota Malang dalam menangani pandemic ini antara lain: melakukan pembatasan dalam pelaksanaan ibadah dan kegiatan keagamaan lain di tempat-tempat ibadah; menghimbau dan mengontrol umatnya untuk mematuhi prokes melalui baik melalui ceramah/ khutbah/ *dharmawacana* atau kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya; serta menghimbau umatnya untuk melakukan vaksinasi.

a. Melakukan Pembatasan Dalam Pelaksanaan Ibadah Dan Kegiatan Keagamaan Lain Di Tempat-Tempat Ibadah

Pandemi Covid-19 telah merubah kebiasaan dan perilaku baik pada tingkat individu maupun sistem di masyarakat. Pola interaksi antar individu dan aktivitas sehari-hari yang biasanya dilakukan secara langsung atau tatap muka berubah menjadi dilakukan secara online melalui berbagai macam media daring. Bukan hanya kegiatan bekerja dan sekolah yang dilakukan secara *blended* (offline dan online) bahkan murni online, namun kegiatan keagamaan dan beribadah juga dilakukan secara *blended* atau bahkan online saja.

Pada awal pandemi masih dilakukan kegiatan ibadah di Vihara secara *blended* dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan (Prokes) termasuk sarana prasarana yang ada di Vihara juga memenuhi prokes. Untuk yang datang langsung ke Vihara selain dibatasi jumlahnya, juga menyarankan usia lanjut usia 60 tahun ke atas untuk mengikuti secara online.

Pada awalnya peribadatan secara online dilakukan dengan memakai google meet yang kemudian diupload di Youtube. Kemudian ada salah satu umat Budhis yang berlangganan zoom, maka pihak Vihara dipinjami link zoom tersebut, sehingga proses ibadah bisa dilakukan melalui zoom. Jaringan yang dimiliki oleh pengurus Vihara dan kepercayaan yang tertanam di antara mereka membuat perubahan proses ibadah selama pandemi bisa dilakukan dengan baik. Meskipun tetap beberapa kegiatan di Vihara ditiadakan selama pandemic seperti kegiatan sekolah Minggu untuk anak-anak demi menjaga keamanan dan membatasi penyebaran Covid-19. Hal yang sama juga terjadi pada peribadatan yang dilakukan oleh umat Katolik, dimana saat pandemi kegiatan keagamaan dilakukan secara *blended*. Kegiatan misa di Gereja bisa diikuti secara online dan offline dengan peserta yang terbatas, menurut Dewi (wawancara, 8 Agustus 2021). Selain itu untuk lansia tidak diperkenankan untuk mengikuti misa secara offline, dimana mereka akan dikunjungi oleh asisten imam untuk memberikan asupan rohani.

Kondisi kegiatan di Gereja yang disampaikan oleh Dewi sejalan yang dikatakan oleh tokoh agama Katolik, Bapak YV yang bertugas di Gereja Santo Yohanes Permadi Janti. Pada awal pandemi, bulan Maret - Mei 2020, pelaksanaan Misa dilakukan online secara keseluruhan dimana seorang imam sendirian atau kadang dibantu seorang imam lain untuk memimpin Misa di Gereja, dan seluruh umat mengikuti secara online. Setelah Mei 2020, pelaksanaan misa dilakukan dengan dual mode atau *blended*. Menurut Bapak YV segala aktivitas di Gereja berdasarkan kebijakan pemerintah, dimana pada saat PPKM berlaku, umat boleh beribadah di Gereja hanya 25 persen dari total kapasitas Gereja (wawancara, 11 Agustus 2021). Selain lansia, anak-anak juga tidak diperbolehkan untuk mengikuti misa secara offline di Gereja.

Namun demikian sebelum PPKM 3 Juli 2021, paroki St. Yohanes Pemandi Janti juga pernah melaksanakan misa full online. Hal ini disebabkan beberapa pejabat Gereja dan sejumlah umat teridentifikasi positif Covid-19. Sehingga untuk menghindari penyebaran Covid-19 maka pihak Gereja tidak memperkenankan umat untuk menghadiri misa secara offline terbatas sebagaimana sebelumnya. Pada saat PPKM darurat diumumkan oleh pemerintah sejak tanggal 3 Juli 2021, Gereja melakukan misa secara online menggunakan aplikasi zoom dan di-streaming-kan melalui youtube.

Hal berbeda terjadi pada umat Hindu, dimana selama pandemi proses persembayangan tetap dilakukan secara langsung di Pura, dimana segala sarana prasarana sesuai dengan prokes juga disediakan seperti: sabun dan tempat cuci tangan, tisu serta hand sanitezer, sebagaimana dikatakan oleh Penjor (wawancara, 8 Agustus 2021). Umat yang datang ke Pura harus mematuhi prokes dan tetep melakukan *social distancing*. Untuk itu pengurus Pura mengatur kedatangan umat secara bergelombang dalam rangka memecah kerumunan di Pura. Selain itu beberapa kegiatan yang biasanya diadakan di Pura juga ditiadakan seperti rapat rutin setiap minggu, pertemuan paguyuban atau temu kangen keluarga di rantauan, dan sekolah agama yang biasanya dilakukan di Pura. Umat juga dihimbau untuk mengurangi kedatangan di Pura, karena mereka bisa melakukan sembahyang di pelakiran yang ada di rumah. Jika umat ingin sembahyang ke Pura maka wajib mematuhi prokes.

Situasi yang hampir sama dengan umat Hindu juga terjadi pada umat Islam, dimana pelaksanaan sholat di Mushola atau Masjid masih tetap dilakukan secara langsung. Sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan prokes juga disediakan baik di Masjid maupun Musholla, seperti tempat cuci tangan dan handsanitazer. Selain itu juga tetap dilakukan *social distancing* pada saat sholat berjamaah dimana shofnya agak longgar. Di samping itu, kondisi yang hampir sama dengan umat agama lain adalah kegiatan di tempat Ibadah, dimana kegiatan yang cenderung memunculkan kerumunan akhirnya diliburkan dulu. Seperti yang terjadi di Masjid yang ada di lingkungan pesantren yang biasanya ada pengajian rutin setiap minggu yang juga bisa dihadiri masyarakat sekitar bahkan dari luar kota, di masa pendemi ini diliburkan menurut penuturan Bayu (wawancara, 1 Agustus 2021).

b. Menghimbau Dan Mengontrol Umatnya Untuk Mematuhi Protokol Kesehatan

Dengan kegiatan keagamaan selama pandemi cenderung dibatasi dengan dilakukan secara *blended* atau bahkan sepenuhnya dilakukan secara online, maka ceramah/ khutbah/ dharmawacana oleh para tokoh agama juga disampaikan secara online. Meskipun tetap ada topik khusus yang disampaikan terkait dengan ajaran agama, namun para tokoh agama juga selalu menyampaikan pesan khusus kepada umatnya terkait dengan penanganan pandemi ini. Para tokoh agama bukan hanya memberikan himbauan, namun juga selalu memperhatikan dan mengontrol umatnya dalam melaksanakan prokes. Bahkan menurut Dewi, ketika mengikuti misa luring yang diadakan terbatas, pihak Gereja juga menginformasikan mekanisme pelaksanaan misa termasuk prosedur untuk penerimaan hosti [roti kudus] itu sudah diatur termasuk kapan masker bisa dibuka pada saat penerimaan hosti. Selama ini kebijakan di Gereja juga sejalan dengan kebijakan pemerintah, jadi kebijakan di Gereja juga disesuaikan.

Penyesuaian antara aturan di tempat ibadah dan kebijakan pemerintah menunjukkan bagaimana sinergi dan komunikasi antara tokoh agama dengan pemerintah. Jaringan dan informasi yang dimiliki oleh tokoh agama menjadi hal penting untuk mendorong kebijakan yang bisa membatasi penyebaran Covid-19. Aturan-aturan dan norma-norma yang didesain oleh tokoh agama juga mempunyai dampak yang signifikan pada umat, khususnya terkait dengan kepatuhan pada prokes, pembatasan melakukan aktivitas di tempat ibadah dan lain sebagainya. Kepercayaan umat kepada tokoh agama membuat himbauan-himbauan dari tokoh agama yang mendukung kebijakan pemerintah menjadi lebih efektif dalam penanganan pandemi ini.

Pada umat Islam juga biasanya ada himbauan-himbauan oleh tokoh agama. Pada komunitas pesantren, himbauan untuk mematuhi prokes dilakukan oleh pengasuh pesantren baik kiai ataupun bu nyai, serta para ustadz. Selain itu para pengurus pesantren yang biasanya berasal dari santri sendiri, juga berperan aktif dalam memberikan edukasi tentang pentingnya mematuhi prokes. Agak berbeda pada komunitas Muslim yang di luar pesantren, dimana selain tokoh agama dan takmir Masjid, para ketua RT atau RW juga aktif melakukan sosialisasi dan himbauan untuk mematuhi Prokes. Himbauan mematuhi prokes di Masjid biasanya dilakukan pada saat sholat Jum'at. Sedangkan ketua RT atau RW biasanya mengingatkan warga terkait Prokes melalui whatsapp group RT atau RW. Hal di atas menunjukkan sinergi yang dibangun antara tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menyampaikan pesan-pesan kesehatan ke masyarakat. Kedua tokoh sama-sama mempunyai modal sosial yang bisa bermanfaat dalam penanganan pandemi ini. Keduanya juga bisa menjadi komunikator kesehatan ke komunitasnya atau ke umatnya, sehingga angka penyebaran Covid-19 bisa diminimalisasi.

c. Menganjurkan dan memfasilitasi umat untuk melakukan vaksinasi

Sejak 13 Januari 2021, pemerintah Indonesia sudah melakukan program vaksinasi Covid-19 dosis pertama dengan menggunakan vaksin sinovac. Program vaksinasi ini juga direspon positif para tokoh agama, dimana mereka menganjurkan para umatnya untuk mengikuti vaksinasi ini. Meskipun tempat-tempat ibadah tidak menyelenggarakan vaksinasi, para tokoh agama atau pengurus tempat ibadah bekerja sama dengan instansi lain dalam menyelenggarakan vaksinasi.

Jaringan yang dimiliki oleh tokoh agama menjadi salah satu modal sosial yang digunakan untuk memfasilitasi umatnya dalam mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan vaksinasi. Umat di dalam agama itu sendiri juga bisa menjadi salah satu jejaring dalam komunitas umat beragama itu sendiri yang itu bisa membentuk *bonding* di intern mereka. Menurut Putnam (1994) melalui *bonding social* maka akan terbentuk ikatan sosial yang kuat yang cenderung mengikat di dalam kelompok tersebut, dan bersifat eksklusif. Hal ini akan membentuk modal sosial yang kuat diantara umat beragama. Umat yang mempunyai posisi juga bisa menjadi *bridging* komunitas beragama ini dengan instansi lain. Dimana dalam konteks yang dijelaskan oleh Penjor, bahwa umat Hindu yang dari TNI AD dan AU ini yang

kemudian menjadi *bridging* dengan AURI (Angkatan Udara Republik Indonesia) dalam penyelenggaraan vaksinasi. Melalui *bridging social* ini, maka bisa menjembatani berbagai kelompok sosial yang beragam, dan bersifat inklusif.

Kondisi yang hampir sama juga pada komunitas Katolik, dimana jaringan yang ada di intern umat Katolik dengan *bonding* yang kuat sehingga bisa berjejaring dengan rumah sakit atau Puskesmas dalam membantu umatnya untuk mendapat vaksinasi. Umat Katolik yang berprofesi sebagai perawat secara tidak langsung menjadi *bridging* antara tokoh agama dan pengurus Gereja, khususnya Satgas Covid-19 di Gereja, dengan pihak rumah sakit dan Puskesmas. Walaupun penyelenggaraan vaksinasi kuotanya terbatas, namun menurut Bapak YV itu sangat membantu, sehingga pihak Gereja tetap bisa memberi informasi dan memfasilitasi umat yang akan melakukan vaksinasi. Dalam pelaksanaan vaksinasi ini jejaring yang dimiliki oleh tokoh agama berkontribusi dalam memperlancar pelaksanaan vaksinasi bagi umatnya. Pada komunitas Muslim sendiri tokoh agama juga berjejaring dengan pemerintahan desa dan juga Dinas Kesehatan. Hal ini terlihat dari penjelasan Ima berikut yang menyatakan bahwa di pesantren dimana dia belajar melaksanakan vaksinasi beberapa kali baik mengikuti program yang diadakan oleh kelurahan maupun menyelenggarakan secara mandiri.

Dalam penanganan pandemi ini sinergi tokoh agama dengan umatnya sangat diperlukan sehingga memunculkan *bonding* diantara mereka dengan upaya yang serentak untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19. *Bonding social* muncul di intern kelompok beragama yang kemudian memunculkan tujuan bersama yang cenderung mengikat di antara anggotanya karena didasarkan atas berbagai kesamaan, serta lebih mengutamakan solidaritas dan kepentingan dalam kelompok yang cenderung eksklusif. Masyarakat Indonesia yang plural dengan berbagai macam agama yang ada menjadi penting adanya forum atau organisasi yang bisa menjadi *bridging* di antara umat beragama ini, salah satunya adalah FKUB. *Bridging social* lebih menekan penyatuan dari berbagai setting sosial yang berbeda, dan berusaha menyatukan kepentingan yang berbeda dari masing-masing anggota kelompok. *Bridging social* mampu menghubungkan berbagai konteks eksternal dan informasi yang luas untuk membangun tujuan bersama. Dalam hal ini melalui FKUB, tokoh lintas agama bisa melakukan komunikasi dan berkoordinasi dalam penanganan pandemi. Selain itu FKUB juga berperan aktif dalam menyampaikan dan mendukung kebijakan pemerintah dalam meminimalisasi penyebaran Covid-19. Kondisi ini memunculkan *linking social* antara umat beragama melalui tokoh agama dengan pemerintah. *Linking social* merupakan hubungan yang terjalin secara vertikal di antara individu atau kelompok yang mempunyai status sosial yang berbeda.

Keterlibatan berbagai pihak dalam penanganan Pandemi sangat dibutuhkan, terutama dalam hal ini tokoh agama baik yang ada di intern komunitas beragama itu sendiri maupun tokoh lintas agama yang tergabung dalam FKUB Kota Malang. Sebagaimana yang dikatakan oleh Putnam (1994) keterlibatan agama, dalam hal ini tokoh agama, dalam modal sosial dapat menghasilkan jenis-jenis jaringan, norma, dan hubungan yang membantu individu dan masyarakat mencapai tujuan-tujuan kolektif. Dimana tujuan kolektif dalam hal ini yang akan dicapai adalah meminimalisasi penyebaran Covid-19 di tengah masyarakat yang multikultural. *Linking social* dan *bridging social* yang sudah terbentuk antara umat beragama, FKUB dan pemerintah akan bermanfaat dalam jangka Panjang dalam menghadapi berbagai perubahan sosial di masyarakat yang sangat dinamis.

4. Peran ‘Kontroversi’ Tokoh Agama dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Namun demikian, tidak semua tokoh agama mempunyai peran yang signifikan dalam penanganan pandemi. Ada juga tokoh agama yang tidak percaya dengan adanya pandemi ini, sehingga mereka tetap melakukan kegiatan seperti biasanya tanpa mematuhi protokol kesehatan. Ketika ada warga mengalami sakit yang mengarah ke gejala Covid-19 seperti batuk, demam dianggap biasa saja, dan semua orang tetap menganggap Covid-19 tidak ada sehingga

mereka tetap menjenguk tetangga yang sakit pun tanpa Prokes. Baru ketika ada warga yang sakit dan saat pergi ke rumah sakit diswab dengan hasil positif kemudian dibawa ke isoter, beberapa kegiatan kemudian diliburkan untuk sementara waktu.

Ketika seorang tokoh agama menganggap pandemi ini sebagai hal yang biasa, maka masyarakat juga akan mengamininya. Sehingga konsekwensinya ada pada kepatuhan masyarakat dalam melakukan Prokes, karena ini merupakan perubahan dari pola interaksi di masyarakat yang biasanya tanpa masker dan tanpa *social distancing*. Sementara pada saat pandemic ini interaksi yang dilakukan harus mematuhi 3M (Mencuci tangan, Memakai Masker, dan Menjaga Jarak), atau bahkan 5M (Mencuci tangan, Memakai Masker, Menjaga Jarak, Mengurangi mobilitas, dan Menjauhi kerumunan). Ketikan pola baru ini tidak dipatuhi maka dikhawatirkan bisa menyebarkan Covid-19. Kondisi ini hampir sama dengan yang terjadi di Korea Selatan, Hindia Barat, Amerika dimana tokoh agama masih menganjurkan kebaktian secara langsung di Gereja tanpa mematuhi Prokes, karena jika tidak mengikuti kegiatan secara langsung dianggap imannya kurang kuat (Bodenbender, 2020; Newman, 2020; Yee, 2020).

Pandangan tokoh agama yang cenderung tidak melihat Pandemi Covid-19 itu dari isu kesehatan secara global, dan dianggap sebagai penyakit biasa yang tidak membahayakan dirinya maupun orang lain, maka cenderung tidak mau melakukan perubahan pola hidup dan dalam berinteraksi. Kondisi ini memicu munculnya cluster Covid-19. Situasi ini bukan hanya terjadi di Kota Malang saja, beberapa kota seperti Jakarta, Yogyakarta, serta beberapa kota di Jawa Barat, Sulawesi Selatan juga muncul kluster Covid-19 dari kegiatan keagamaan yang dilakukan secara langsung tanpa mengindahkan Prokes. Dalam konteks di Indonesia, tokoh agama masih mempunyai peran yang kuat dan sentral termasuk dalam mempengaruhi umatnya dalam mematuhi Prokes. Untuk itu menjadi penting melihat konteks epidemiologi dengan perilaku beragama dari umat yang banyak dipengaruhi oleh tokoh agamanya (Bavel et al., 2020; Wildman et al., 2020).

Hal ini sebenarnya perlu keterlibatan dari tokoh-tokoh agama baik di intern agama itu sendiri maupun lintas agama untuk berkoordinasi dan berkomunikasi dalam penanganan pandemic ini. Sehingga jika ada pendapat yang berbeda dengan tokoh agama yang lain dan/atau kebijakan pemerintah bisa diselesaikan secepatnya, dan umat juga tidak mengalami kebingungan di masa pandemi ini. Dalam penanganan Pandemi ini, FKUB berusaha menjalin komunikasi baik antar umat beragama atau di intern umat mereka sendiri agar upaya kolektif untuk mengatasi penyebaran Covid-19 bisa dilakukan secara maksimal. Bahkan menurut Riris, pihak Kementrian Agama juga berusaha untuk mendekati para pengurus Masjid ini untuk memberikan pemahaman dan melakukan sosialisasi tentang Covid-19, namun usaha mereka belum membuahkan hasil (wawancara, 9 September 2021). Hal ini dikarenakan pihak pengurus Masjid cenderung menutup diri. Bahkan himbauan dari Satgas Covid yang ada di kelurahan maupun RT/RW juga tidak mereka patuhi, dan pihak Satgas juga tidak berani memaksa, mereka lebih cenderung menyampaikan saja. Lebih lanjut Riris juga mengatakan bahwa masyarakat melihat Pandemi ini memang tidak focus pada penyakitnya, namun lebih pada efek yang timbulkan oleh Pandemi ini dimana mereka kehilangan pekerjaan karena PHK di tempat kerjanya (wawancara, 9 September 2021). Sehingga frustrasi yang mereka rasakan diungkapkan melalui perilaku bahwa Covid-19 ini tidak ada, dan tidak mau mengikuti perubahan pola hidup dan pola interaksi dalam meminimalisasi penyebaran virus ini.

Kontroversi peran tokoh agama dalam penanganan pandemi yang tidak sejalan dengan kebijakan penerintah membuat *bonding social* di dalam umat menjadi tidak kuat. Hal ini dikarenakan umat juga masih menaruh kepercayaan pada tokoh agama dan cenderung bersikap *taklid* (mematuhi saja tanpa bersikap kritis), namun di sisi lain ada juga umat yang mempertanyakan apa yang dipahami tokoh agama bertolak belakang dengan informasi mereka dapatkan dari Satgas Covid-19 yang ada di RT/RW, serta informasi dari luar seperti dari media massa, media sosial dan tenaga medis. Bagi umat yang menaruh kepercayaan pada tokoh

agama, maka mereka cenderung tidak mematuhi prokes dan tetap melakukan aktivitas seperti biasanya. Sementara umat yang mempunyai jaringan intelektual atau medis di luar lingkungannya, maka lebih mematuhi prokes meskipun mendapat stigma dari masyarakat di sekitarnya karena dianggap takut Covid.

Begitu juga kaitannya *briging social* dan *linking social* juga tidak bisa berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan tokoh agama cenderung tertutup dengan orang luar dan menganggap mereka mempunyai otoritas dalam menentukan sikapnya untuk menghadapi pandemi ini. Peran tokoh agama yang kontroversial justru menunjukkan modal sosial yang dimiliki oleh tokoh agama tersebut lemah, serta merugikan ummatnya dalam mengatasi pandemi ini, karena lemahnya *bonding social* di internal umat beragama itu sendiri, serta tidak ada *bridging social* dengan komunitas lain dan *linking social* dengan pemerintah. Situasi yang muncul adalah eksklusifitas yang merugikan umat.

Kesimpulan

Berbagai macam interpretasi tokoh agama terkait pandemi Covid-19 ini, secara tidak langsung juga mempengaruhi peran yang dilakukannya dalam meminimalisir penyebaran Covid-19. Pertama, pandemi dipahami sebagai bagian perubahan sosial yang dinamis terkait hubungan manusia dengan lingkungannya, maka dalam menangani pandemi lebih ditekankan untuk beradaptasi dalam meminimalisasi penyebaran Covid-19 dengan mengubah gaya hidup dan mematuhi Prokes. Kedua, pandemi dipahami sebagai wabah penyakit, sehingga harus dilakukan penanganan secara ilmiah dan mematuhi kebijakan pemerintah. Di samping itu sebagai umat beragama perlu melakukan pendekatan secara religi dengan berdoa dan bersyukur. Pemahaman tersebut mendorong tokoh agama untuk berperan secara signifikan dalam penanganan pandemi, antara lain: melakukan pembatasan dalam pelaksanaan ibadah dan kegiatan keagamaan di tempat-tempat ibadah, menghimbau dan mengontrol ummatnya untuk mematuhi Prokes, menganjurkan dan memfasilitasi ummatnya untuk melakukan vaksinasi. Pandemi ini juga menuntut para tokoh agama dan ummatnya untuk melakukan perubahan serta beradaptasi dengan teknologi dalam melakukan peribadatan secara on-line.

Modal sosial yang dimiliki oleh tokoh agama berperan dalam penanggulangan pandemi ini, baik itu berupa jaringan, norma, dan kepercayaan. Kuatnya modal sosial ini memunculkan *bonding* diantara umat beragama, serta *linking* antara umat beragama melalui tokoh agama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan serta lembaga pemerintah lainnya. *Linking* bisa berjalan dengan baik atas dukungan FKUB yang menjadi *bridging* antara umat beragama dan pemerintah. Namun demikian tidak semua tokoh agama mempunyai peran yang signifikan dalam penanganan pandemi. Ada juga beberapa tokoh agama yang melakukan peran kontroversi dalam upaya penanganan pandemi. Hal ini dikarenakan mereka tidak mempercayai adanya Covid-19. Peran kontroversi ini membuat *bonding* diantara umat tidak kuat, serta *linking* dan *bridging* pada komunitas ini juga tidak berjalan efektif karena tokoh agama cenderung eksklusif.

Daftar Pustaka

- Agetya, A., & Haikal. (2021, January 11). *Tidak Hanya Pejabat, Vaksin Kota Malang Akan Diberikan Kepada Sejumlah Tokoh*. Nusadaily.Com. Retrieved from <https://nusadaily.com/regional/tidak-hanya-pejabat-vaksin-kota-malang-akan-diberikan-kepada-sejumlah-tokoh.html>
- Aje. (2020, February 24). *Jelang Pilkada Kabupaten Malang, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Komitmen Jaga Kerukunan*. Nusadaily.Com. Retrieved from <https://nusadaily.com/regional/jelang-pilkada-kabupaten-malang-tokoh-agama-dan-tokoh-masyarakat-komitmen-jaga-kerukunan.html>

- Aminudin, M. (2021). *Angka Kematian Covid-19 Malang Raya Tertinggi di Indonesia*. Dipetik Agustus 5, 2021, dari news.detik.com: <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5119713/angka-kematian-covid-19-malang-raya-tertinggi-di-indonesia>
- Bavel, J. J. V., Baicker, K., Boggio, P. S., Capraro, V., Cichocka, A., Cikara, M., ... Willer, R. (2020). Using social and behavioural science to support COVID-19 pandemic response. *Nature human behaviour*, 4(5), 460-471.
- Bodenbender, S. (2020). *The Role of Religious Leaders in Conflict Transformation*. Suffolk Nwes-Herald, pp. 7–9.
- Coleman, J. S. (1988). Social Capital In The Creation Of Human Capital. *American Journal of Sociology*, 94, 95–120. <https://doi.org/10.1086/228943>
- Djalante, R., Lassa, J., Setiamarga, D., Sudjatma, A., Indrawan, M., Haryanto, B., ... Warsilah, H. (2020). Review and analysis of current responses to COVID-19 in Indonesia: Period of January to March 2020. *Progress in Disaster Science*, 6(march). <https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2020.100091>
- Febrianto, V., & Astro, M. (2020). *Malang Raya Segera Masuki Masa Transisi Usai Pelaksanaan PSBB*. Dipetik Agustus 5, 2021, dari antaranews.com: <https://www.antaranews.com/berita/1519165/malang-raya-segera-masuki-masa-transisi-usai-pelaksanaan-psbb>
- Hartik, A. (2020, August 11). *Penjemputan Paksa Jenazah Covid-19, Wali Kota Malang Kumpulkan Tokoh Agama*. Kumparan.Com. Retrieved from <https://regional.kompas.com/read/2020/08/11/20001671/penjemputan-paksa-jenazah-covid-19-wali-kota-malang-kumpulkan-tokoh-agama?page=all>
- Ikhwan, H., & Yulianto, V. I. (2020). *How religions and religious leaders can help to combat the COVID-19 pandemic: Indonesia's experience*. *The Conversation*, 1–3. Retrieved from <https://theconversation.com/how-religions-and-religious-leaders-can-help-to-combat-the-covid-19-pandemic-indonesias-experience-140342>
- Marshall, K. (2016). *Case Study: Responding To the Ebola Epidemic in West Africa : What Role Does Religion Play ?* Berkley Center for Religion, Peace & World Affairs, 1, 1–20.
- Miller, J. (2020, July 7). *How are religious groups responding to the coronavirus pandemic?* USCNews, pp. 1–6. Retrieved from <https://news.usc.edu/168381/religious-groups-coronavirus-pandemic-religion-passover-easter/>
- Newman, M. (2020). *To find meaning in a pandemic, top religious leaders offer 'Coronaspection.'* *The Times of Israel*, 1–7.
- Pennisi, E. (2020). *Does Religion Influence Epidemics ? More from News*. AAAS Science Magazine, 8, 1–7.
- Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. New Jersey: Princeton University Press.
- Putnam, R. D. (1994). Social Capital and Public Affairs. *Buletin of the American Academy of Arts and Science*, 47(8), 5–19.
- Wildman, W. J., Bulbulia, J., Sosis, R., & Schjoedt, U. (2020). Religion and the COVID-19 pandemic. *Religion, Brain and Behavior*, 10(2), 115–117. <https://doi.org/10.1080/2153599X.2020.1749339>
- World Health Organisation. (2020). *Risk communication and community engagement readiness and initial response for novel coronaviruses (nCoV)*. Who, 1(January), 1–3. Retrieved from WHO/2019-nCoV/RCCE/2020.2
- Yee, V. (2020). *In a Pandemic, Religion Can Be a Balm and a Risk*. *The New York Times*. Retrieved from <https://www.nytimes.com/2020/03/22/world/middleeast/coronavirus-religion.html>